

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gizi merupakan salah satu elemen penting yang dapat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Menurut Nasution *et al.* (2024), gizi yang optimal memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan emosional anak usia dini. Selain itu, gizi juga berperan penting terhadap pendidikan anak. Anak dengan gizi yang tercukupi memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, konsentrasi yang lebih tinggi, dan perkembangan otak yang optimal. Sebaliknya, anak dengan gizi yang tidak tercukupi akan berdampak pada kemampuan dan produktivitasnya dalam belajar.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan kompleks, terutama dalam bidang gizi (Meidiawati *et al.*, 2024). Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024, prevalensi *stunting* pada anak di Indonesia mencapai angka 19,9% (Kemenkes, 2025). Hal ini mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan status gizi siswa. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024 yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik melalui pemberian satu porsi makanan bergizi seimbang setiap hari di sekolah. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sasaran program MBG mencakup peserta didik jenjang

PAUD, pendidikan dasar, dan juga sekolah menengah. Pelaksanaannya diatur melalui petunjuk teknis penyelenggaraan program MBG tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, 2025). Proses pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tingkat, yaitu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pada tingkat pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama pengelola program MBG bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. Di tingkat provinsi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang memperkuat koordinasi antar dinas kesehatan, pendidikan, sosial, dan pangan. Di tingkat kabupaten/kota, tim pelaksana MBG membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mengelola dan mendistribusikan makanan kepada kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia sekolah di tingkat wilayahnya (Kemenko PMK, 2025). Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sekitar Rp 71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 dengan target penerima awal sebanyak 19,74 juta jiwa siswa, yang kemudian ditingkatkan menjadi 82,9 juta orang di seluruh Indonesia yang terdiri dari peserta didik jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dalam pengimplementasiannya, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak sekolah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan melalui sistem dapur MBG yang berfungsi menyiapkan serta mendistribusikan menu dengan standar gizi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2025). Satu porsi makanan

umumnya terdiri dari nasi, lauk hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan susu. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat masalah serius di beberapa daerah di Indonesia dalam kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu kejadian keracunan massal yang diakibatkan oleh menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) (Detiknews, 2025). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa jumlah korban keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus 11.566 anak, dengan provinsi tertinggi korban keracunan adalah Jawa Barat yang mencapai 4.125 anak (Wantimpres, 2025).

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak Januari 2025 lalu. Aceh merupakan salah satu dari 26 provinsi pertama yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap awal peluncurannya di bulan Januari 2025. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, angka *stunting* di Provinsi Aceh masih tergolong tinggi, yakni mencapai 28,6% (Detiksumut, 2025). Dengan angka yang menjadi salah satu tertinggi di Sumatera tersebut, Pemerintah Aceh menindaklanjuti masalah ini melalui Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan pelaksanaan program MBG di beberapa daerah uji coba, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Tenggara (Antara Aceh, 2025).

Menurut data per September 2025, program MBG di Aceh meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif sebanyak 319 unit dari target 645 unit

(49,45%), dengan total *supplier* sebanyak 574 pihak dan total penerima manfaat mencapai 974.761 orang (79,51% dari target) (Kemenkeu Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kota Lhokseumawe juga menjadi salah satu daerah di Provinsi Aceh yang sudah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak beberapa bulan lalu. Walaupun Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang mampu menekan angka *stunting* dibandingkan daerah lain di Aceh, angka prevalensi sebesar 17,4% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa daerah tersebut masih memiliki tantangan dalam penanganan dan pencegahan masalah gizi jangka panjang. Meskipun tidak termasuk ke dalam enam wilayah uji coba tahap awal di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe telah mulai melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Februari 2025.

Sekolah-sekolah prioritas yang menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SK BGN No. 58.1/2025. Syarat dan kriteria tersebut mencakup kesiapan infrastruktur dapur dan sekolah, jarak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekolah, data *stunting* sekolah, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat (BGN, 2025). Di Kota Lhokseumawe sendiri, Program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai pada awal bulan Februari 2025 lalu dengan hanya menargetkan 1.278 siswa dari berbagai sekolah di daerah tersebut. Hal itu disebabkan karena hanya beberapa sekolah saja di Kota Lhokseumawe yang memenuhi syarat kriteria prioritas pertama pada program ini. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari SMKN 1 Kota Lhokseumawe (944 siswa), SDN 9 Banda Sakti (120 siswa), SDN 21 Banda Sakti (111 siswa), SLB Kota

Lhokseumawe (52 siswa), TK Ar-Rahmah (27 siswa), dan TK Malikussaleh (24 siswa) (Aceh Jurnal Network, 2025).

Kota Lhokseumawe sendiri tidak mengalokasikan dana khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, dalam artian program di daerah tersebut sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat (Bakatanet, 2025). Di wilayah Kota Lhokseumawe, terdapat 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah dibentuk dan dibagi di beberapa kecamatan. Dalam perspektif sosiologi kebijakan, kebijakan publik seperti MBG ini tidak hanya dilihat sebagai intervensi dari negara saja. Keberhasilan suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan birokratis, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Hal itu sejalan dengan pernyataan Mahsyar (2024), yang menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, orang tua siswa memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu instansi pendidikan yang tidak memenuhi syarat prioritas utama pada tahap awal peluncuran adalah SDN 4 Banda Sakti di Kota Lhokseumawe. Pada tahap awal peluncuran di bulan Februari lalu, sekolah tersebut tidak memenuhi kriteria seperti jarak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terlalu jauh serta data *stunting* sekolah yang belum masuk kategori prioritas. Namun demikian, sekolah ini pada akhirnya mulai melaksanakan program tersebut pada tahap berikutnya di bulan Agustus lalu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 447 siswa. Dengan status sekolah yang terbilang baru dalam

melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, tentu diperlukan telaah mengenai perspektif orang tua siswa guna mendukung evaluasi keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti sebagai salah satu sekolah penerima manfaat, perspektif orang tua siswa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menunjukkan berbagai macam respons. Salah satu orang tua siswa SDN 4 Kecamatan Banda Sakti, Halimah (40 tahun), mengatakan bahwa program ini memberikan banyak manfaat bagi siswa dan orang tua, baik dalam segi peningkatan gizi maupun bantuan terhadap pengelolaan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga memicu munculnya rasa kekhawatiran di kalangan orang tua siswa lainnya. Yusuf (38 tahun), seorang tua siswa lainnya, menyampaikan bahwa hadirnya program ini memunculkan kecemasan terhadap kebijakan operasionalnya, terutama setelah maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus keracunan massal di berbagai wilayah. Orang tua tersebut menilai bahwa program yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan gizi ini malah berpotensi membahayakan kesehatan anak jika tidak dikelola dengan baik (Observasi dan wawancara awal, 25 Oktober 2025).

Kekhawatiran yang dirasakan oleh beberapa orang tua siswa di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini merupakan sebuah fenomena sosiologis yang sangat beralasan. Hal ini timbul sebagai imbas langsung dari banyaknya kasus-kasus keracunan makanan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus keracunan massal yang diakibatkan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

yang tidak mematuhi *standard operating procedure* (SOP) ini membuat orang tua siswa merasa takut kejadian serupa akan menimpa sekolah anak mereka. Kekhawatiran ini direspons oleh Dinas Kesehatan setempat yang segera memanggil 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lhokseumawe untuk mempercepat pengurusan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) (Kompas, 2025). SLHS tersebut merupakan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bukti valid bahwa dapur penyelenggara program telah memenuhi ketentuan kebersihan dan sanitasi yang layak (Kompas, 2025).

Dari kumpulan data awal di atas, dapat ditemukan adanya berbagai perspektif yang saling tarik-menarik di kalangan orang tua siswa terhadap penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Fenomena respons sosial ini tentu sangat penting untuk diteliti lebih mendalam karena eksistensi sebuah program publik tidak seharusnya hanya dipandang dari sudut pandang intervensi sepihak negara. Keberhasilan implementasi dari sebuah program pelayanan publik juga mutlak memerlukan pemahaman, penilaian objektif, serta dukungan penerimaan dari masyarakat selaku target sasaran utama. Oleh karena itu, prinsip evaluasi yang sama juga perlu diterapkan untuk meneliti lebih luas sejauh mana perspektif komprehensif orang tua siswa di sekolah penerima manfaat tersebut dalam merespons kebijakan gizi negara ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Perspektif Orang Tua Siswa Terhadap Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda

Sakti Kota Lhokseumawe", dan selanjutnya rumusan masalah difokuskan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Orang Tua Siswa terhadap kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 4 Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja bentuk dukungan Orang Tua Siswa terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Banda Sakti Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perspektif orang tua siswa terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian ini mencakup pandangan, penilaian, pengalaman, serta respon orang tua siswa terhadap keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pemerintah di sekolah.
2. Bentuk dukungan orang tua siswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian ini menelaah bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana perspektif orang tua siswa mengenai tujuan dan pelaksanaan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- b. Mendeskripsikan bentuk dukungan orang tua siswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam subdisiplin sosiologi kebijakan publik dan sosiologi keluarga, melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat (khususnya orang tua siswa) membentuk dan mengonstruksi perspektif mereka terhadap kebijakan pemerintah di bidang intervensi gizi dan pendidikan.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan penerapan Teori Konstruksi Sosial dalam memahami dinamika, negosiasi kultural, serta proses penerimaan suatu kebijakan di tingkat masyarakat akar rumput.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan: Hasil penelitian mengenai dinamika perspektif orang tua ini dapat menjadi bahan masukan sosiologis yang komprehensif dalam mengevaluasi, memitigasi risiko, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Bagi Sekolah dan Pelaksana Program: Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan instrumen pengevaluasian terhadap kebijakan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Lhokseumawe, khususnya dalam menjembatani komunikasi antara penyedia layanan dengan pihak sekolah.
3. Bagi Orang Tua Siswa: Penelitian ini dapat memberikan ruang kebebasan bersuara bagi orang tua siswa dalam menilai program pemerintah, sehingga dukungan, kecemasan, serta aspirasi mereka dapat terwadahi secara objektif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Hasil eksplorasi kualitatif ini dapat dijadikan referensi dan pijakan awal dalam pengembangan studi serupa yang berfokus pada kebijakan sosial, sosiologi pangan, gizi anak, serta partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik.